



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana dan RKPD Semesta Berencana.

- (3) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026; dan
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - p. Dinas Kebudayaan;
 - q. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - s. Dinas Perhubungan;
 - t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
 - v. Dinas Pariwisata;
 - w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - y. Dinas Ketenagakerjaan;
 - z. Dinas Pertanian;
 - aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - bb. Kecamatan Nusa Penida;
 - cc. Kecamatan Dawan;
 - dd. Kecamatan Banjarangkan; dan
 - ee. Kecamatan Klungkung.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Kesehatan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2026 untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Perhubungan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja Dinas Pariwisata Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Dinas Pertanian Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Kecamatan Nusa Penida Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (30) Renja Kecamatan Dawan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Klungkung Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KLUNGKUNG,



I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 19



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KETENAGAKERJAAN



RENCANA KERJA
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat-Nya Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 dapat tersusun.

Kedudukan Ranwal Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan Pedoman penyusunan Anggaran di Tahun 2026.

Selesainya penyusunan Ranwal Rencana Perangkat daerah ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Tim Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
2. Bidang Koordinasi Baperlitbang Kabupaten Klungkung.
3. Staf di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung.
4. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Ranwal Renja Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Sumarta, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196509091986021008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	20
2.4 Reviu terhadap Ranwal RKPD.....	21
2.5 Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat.....	29
BAB III	30
3.1 Telahan Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	31
3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
BAB IV	39
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
BAB V	52
5.1 Catatan Penting	52
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan.....	52
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Terhadap Evaluasi Renja Tahun 2024	11
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	19
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.4 Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung	20
Tabel 2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	23
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	34
Tabel 3.2 Tingkat partisipasi Angkatan kerja Provinsi Bali	34
Tabel 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan	35
Tabel 4.1 Rancangan Akhir Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	41

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN 2026

Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana
Tahun 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja PD merupakan salah satu dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah yang memuat program kegiatan yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran pembangunan dan dibuat setiap tahun. Penyusunan Renja dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan Renja PD sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi enam tahapan yaitu a) persiapan penyusunan; b) penyusunan rancangan awal; c) penyusunan rancangan, d) pelaksanaan forum perangkat daerah, e) perumusan rancangan akhir; dan f) penetapan.

Renja PD disusun berpedoman pada Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi . Untuk mewujudkan tema tersebut dijabarkan melalui prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang

untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun prioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia.
2. Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif.

maka penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya.. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra PD. Penyusunan Renja PD harus mempertimbangkan hasil evaluasi yang memuat identifikasi permasalahan, isu strategis dan rekomendasi tindak lanjut untuk memecahkan masalah.

Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Renja PD berfungsi menjabarkan Renstra PD ke dalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, dan program kegiatan prioritas Perangkat Daerah. Selain itu penyusunan renja PD memerlukan masukan dari stakeholders melalui forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang. Pelaksanaan Forum Perangkat daerah bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal Renja PD secara partisipatif dari stakeholders meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program

dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dan penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Renja PD ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah ditetapkannya RKPD dengan Peraturan Bupati. Penetapan ini menjadikan Renja PD memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan pedoman bagi penyusunan dokumen penganggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

6. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Nasional.
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7li Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupten Klungkung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2044.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah untuk :

- a. menyediakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2026.
- b. menyediakan tolak ukur penilaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah :

- a. Untuk merumuskan program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target kinerjanya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung selama tahun 2026 dan sejalan dengan target dan prioritas daerah.
- b. Untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran.
- c. Untuk menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN terdiri dari :
 - a. Latar belakang (berisi tentang pengertian renja, proses penyusunan, keterkaitan dengan dokumen RKPD, renstra),
 - b. Landasan hukum (menyajikan peraturan yang menjadi acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD)
 - c. Maksud dan tujuan,
 - d. Sistematika Penulisan

2. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU terdiri dari :

- a. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra (realisasi program/keg, factor penghambat, implikasinya terhadap target akhir renstra, kebijakan/tindakan yg perlu diambil.
 - b. Analisis kinerja Pelayanan perangkat Daerah (menyajikan SPM, NSPK atau IKU).
 - c. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
 - d. Review terhadap Ranwal RKPD
3. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD terdiri dari :
- a. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - b. Tujuan dan sasaran renja
 - c. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (menjelaskan program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas PD dan targetnya yg terkait prioritas daerah, factor yg menjadi bahan pertimbangan, dan rumusan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak sesuai dengan ranwal)
4. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- a. Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
5. BAB V PENUTUP
- a. Catatan Penting
 - b. Kaidah – Kaidah Pelaksanaan
 - c. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

KETENAGAKERJAAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD SKPD yang bersangkutan. Rencana kerja 2024 sesuai bidang urusan pemerintahan daerah yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan dan urusan pilihan bidang industry dan transmigrasi didukung 5 program, 12 Kegiatan dan 16 Sub kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sampai dengan Evaluasi Renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel Sirenbangda terlampir.

Konsistensi penyusunan Rencana kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan pelaksanaannya (DPA OPD) Tahun 2024 terbangun cukup baik yang terlihat dari kesesuaian program dan kegiatan yang dirancang dari Renstra, Renja dan DPA OPD. Berdasarkan hasil evaluasi renja tahun 2024, total rata rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 106,23% dengan predikat kinerja Baik (B) sedangkan tingkat serapan anggaran sebesar 106,23 % dengan predikat kinerja Baik (tabel sirenbangda terlampir). Adapun capaian target kinerja program/ kegiatan dan penyerapan dana Evaluasi renja Tahun 2024 diuraikan sesuai bidang urusan, adalah sebagai berikut :

2.1.1 Bidang Urusan Ketenagakerjaan

Dengan didukung 4 program, total rata rata capaian kinerja dan anggaran bidang urusan ketenagakerjaan sebesar Rp. 6.214.545.759,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 5.716.363.675,00 dengan predikat kinerja Sangat Baik (SB) dan rata capaian anggaran sebesar 91,98 % dengan predikat sedang (B), Program bidang urusan ketenagakerjaan yaitu antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari Program yaitu 97,74% berpredikat kinerja sangat Baik. capaian serapan anggaran sebesar 97,74 % dengan predikat kinerja Baik (B)
- 2) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga kerja, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu 100 % berpredikat kinerja Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 92,00 % dengan predikat kinerja Baik (B)
- 3) Program Penempatan Tenaga Kerja, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah sebesar 100% dengan predikat

kinerja Sangat Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 58,08 % dengan predikat kinerja sedang (S).

- 4) Program Hubungan Industrial, total rata rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan adalah sebesar 100 % dengan predikat kinerja sedang Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 58,05 % dengan predikat kinerja sedang (S)

2.1.2 Bidang Ketrasmigrasian

Bidang Urusan Ketrasmigrasian pada Renja Dispernaker Tahun 2024 didukung 1 program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan 1 kegiatan dan 1 Sub Kegiatan . Total rata rata capaian kinerja Program sebesar 100 % dengan predikat Baik (B) dan anggaran sebesar 51,34 % dengan predikat kinerja sedang (S). Program bidang urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yaitu antara lain:

- 1). Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, dengan total rata rata capaian Indikator kinerja dan anggaran dari seluruh kegiatan yaitu 100 % dengan predikat baik (B), Kegiatan 100 % serta Sub Kegiatan 100 % berpredikat kinerja Baik. dan capaian serapan anggaran sebesar 51,34 % dengan predikat kinerja Sedang (S).

2.1.3 Bidang Urusan Sumber Daya Energi dan Mineral

Badan Urusan Sumber daya Energi dan Mineral dengan Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tidak ada dikarenakan belum ditemukannya panas bumi di Kabupaten Klungkung.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Terhadap Evaluasi Renja Tahun 2024

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Perubahan Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)		
2				18,379,617,259.00		5,716,363,675.00		6,214,545,759.00		5,716,363,675.00				6,082,535,788.00		17,515,263,138.00		95.30%	
2	16			18,379,617,259.00		5,716,363,675.00		6,214,545,759.00		5,716,363,675.00				6,082,535,788.00		17,515,263,138.00		95.30%	
2	07	01		218.00	15,477,510,029.00	7100	4,334,091,938.00	7100	4,434,488,889.00	7100	4,334,091,938.00	100.00%	97.74%	72.00	5,541,508,608.00	214.00	14,209,692,484.00	98.17%	91.81%
2	07	01	2.01	300.00	29,476,260.00	90.00	10,921,800.00	100.00	25,057,580.00	90.00	10,921,800.00	90.00%	43.59%	100.00	2,209,340.00	280.00	24,052,940.00	93.33%	81.60%

2	07	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	27.00	5,184,360.00	9.00	2,734,000.00	9.00	3,095,080.00	9.00	2,734,000.00	100.00%	88.33%	9.00	1,044,640.00	27.00	6,512,640.00	100.00%	125.62%
2	07	01	2.0	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	96.00	24,291,900.00	32.00	8,187,800.00	32.00	21,962,500.00	32.00	8,187,800.00	100.00%	37.28%	32.00	1,164,700.00	96.00	17,540,300.00	100.00%	72.21%
2	07	01	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Persen)	300.00	14,347,437,595.00	100.00	3,792,903,995.00	100.00	3,841,281,611.00	100.00	3,792,903,995.00	100.00%	98.74%	100.00	5,264,466,064.00	300.00	12,850,274,054.00	100.00%	89.56%
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	72.00	14,237,282,499.00	24.00	3,744,298,911.00	24.00	3,787,885,007.00	24.00	3,744,298,911.00	100.00%	98.85%	24.00	5,226,783,072.00	72.00	12,715,380,894.00	100.00%	89.31%
2	07	01	2.0	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	42.00	110,155,096.00	14.00	48,605,084.00	14.00	53,396,604.00	14.00	48,605,084.00	100.00%	91.03%	14.00	37,682,992.00	42.00	134,893,160.00	100.00%	122.46%
2	07	01	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	300.00	17,189,368.00	96.69	97,501,589.00	100.00	100,492,216.00	96.69	97,501,589.00	96.69%	97.02%	100.00	60,016,972.00	293.38	255,020,150.00	97.79%	148.36%
2	07	01	2.0	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	36.00	17,189,368.00	12.00	97,501,589.00	12.00	100,492,216.00	12.00	97,501,589.00	100.00%	97.02%	12.00	60,016,972.00	36.00	255,020,150.00	100.00%	148.36%
2	07	01	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor (Persen)	300.00	43,354,040.00	100.00	310,154,400.00	100.00	321,783,340.00	100.00	310,154,400.00	100.00%	96.39%	100.00	5,573,600.00	300.00	67,604,400.00	100.00%	155.94%
2	07	01	2.0	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	3.00	3,131,600.00	1.00	1,046,000.00	1.00	1,046,000.00	1.00	1,046,000.00	100.00%	100.00%	1.00	1,042,800.00	3.00	3,134,800.00	100.00%	100.10%

2	07	01	2.0	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10.00	28,200,000.00	2.00	27,500,000.00	4.00	28,200,000.00	2.00	27,500,000.00	50.00%	97.52%	-	0.00	4.00	55,000,000.00	40.00%	195.04%
2	07	01	2.0	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.00	6,995,000.00	1.00	864,000.00	1.00	1,026,500.00	1.00	864,000.00	100.00%	84.17%	3.00	2,970,000.00	5.00	4,698,000.00	71.43%	67.16%
2	07	01	2.0	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12.00	5,027,440.00	4.00	1,605,400.00	4.00	1,905,840.00	4.00	1,605,400.00	100.00%	84.24%	4.00	1,560,800.00	12.00	4,771,600.00	100.00%	94.91%
2	07	01	2.0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	300.00	475,197,080.00	100.00	147,448,681.00	100.00	155,537,536.00	100.00	147,448,681.00	100.00%	94.80%	100.00	157,909,272.00	300.00	452,806,634.00	100.00%	95.29%
2	07	01	2.0	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36.00	152,448,000.00	12.00	39,578,145.00	12.00	43,909,000.00	12.00	39,578,145.00	100.00%	90.14%	12.00	52,349,000.00	36.00	131,505,290.00	100.00%	86.26%
2	07	01	2.0	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36.00	322,749,080.00	12.00	107,870,536.00	12.00	111,628,536.00	12.00	107,870,536.00	100.00%	96.63%	12.00	105,560,272.00	36.00	321,301,344.00	100.00%	99.55%
2	07	01	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	300.00	410,149,686.00	100.00	254,300,473.00	100.00	279,941,606.00	100.00	254,300,473.00	100.00%	90.84%	100.00	513,333,360.00	300.00	559,934,306.00	100.00%	136.52%

2	07	01	2.0 9	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	56.00	182,179,686.00	8.00	45,110,864.00	18.00	70,471,606.00	8.00	45,110,864.00	44.44%	64.01%	8.00	42,083,360.00	34.00	132,305,088.00	60.71%	72.62%
2	07	01	2.0 9	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	44.00	28,970,000.00	13.00	10,400,000.00	13.00	10,470,000.00	13.00	10,400,000.00	100.00%	99.33%	15.00	9,250,000.00	41.00	30,050,000.00	93.18%	103.73%
2	07	01	2.0 9	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00	199,000,000.00	3.00	198,789,609.00	3.00	199,000,000.00	3.00	198,789,609.00	100.00%	99.89%	-	0.00	6.00	397,579,218.00	100.00%	199.79%
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (Orang)	230.00	1,700,929,390.00	60.00	663,992,663.00	60.00	721,768,870.00	60.00	663,992,663.00	100.00%	92.00%	85.00	469,582,260.00	205.00	1,797,567,586.00	89.13%	105.68%
2	07	03	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (Orang)	80.00	217,248,430.00	20.00	98,647,438.00	20.00	107,548,550.00	20.00	98,647,438.00	100.00%	91.72%	40.00	54,849,940.00	80.00	252,144,816.00	100.00%	116.06%
2	07	03	2.0 1	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	80.00	217,248,430.00	20.00	98,647,438.00	20.00	107,548,550.00	20.00	98,647,438.00	100.00%	91.72%	40.00	54,849,940.00	80.00	252,144,816.00	100.00%	116.06%
2	07	03	2.0 5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (Orang)	130.00	1,483,680,960.00	40.00	565,345,225.00	40.00	614,220,320.00	40.00	565,345,225.00	100.00%	92.04%	45.00	414,732,320.00	125.00	1,545,422,770.00	96.15%	104.16%

2	07	03	2.0 5	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di	130.00	1483,680,960.00	40.00	565,345,225.00	40.00	64,220,320.00	40.00	565,345,225.00	100.00%	92.04%	45.00	44,732,320.00	125.00	1,545,422,770.00	96.15%	104.16%
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pelayanan Antar Kerja (persen)	100.90	1,046,462,640.00	79.88	675,435,324.00	60.90	984,481,360.00	79.88	675,435,324.00	131.17%	68.61%	20.00	30,990,640.00	179.76	1,381,861,288.00	178.16%	132.05%
2	07	04	2.0 1		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja (Kerjasama)	150.00	1,020,356,560.00	110.00	659,458,474.00	110.00	958,375,280.00	110.00	659,458,474.00	100.00%	68.81%	20.00	30,990,640.00	240.00	1,349,907,588.00	160.00%	132.30%
2	07	04	2.0 1	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	578.00	168,198,100.00	39.00	60,924,794.00	30.00	106,216,820.00	39.00	60,924,794.00	130.00%	57.36%	500.00	30,990,640.00	578.00	152,840,228.00	100.00%	90.87%
2	07	04	2.0 1	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	160.00	852,158,460.00	80.00	598,533,680.00	80.00	852,158,460.00	80.00	598,533,680.00	100.00%	70.24%	-	0.00	160.00	1,197,067,360.00	100.00%	140.47%
2	07	04	2.0 3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Orang)	200.00	26,106,080.00	483.00	15,976,850.00	200.00	26,106,080.00	483.00	15,976,850.00	241.50%	61.20%	-	0.00	966.00	31,953,700.00	483.00%	122.40%
2	07	04	2.0 3	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online Karir Hub) (Orang)	200.00	26,106,080.00	483.00	15,976,850.00	200.00	26,106,080.00	483.00	15,976,850.00	241.50%	61.20%	-	0.00	966.00	31,953,700.00	483.00%	122.40%

2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak Hak Pekerja (Persen)	15.00	154,715,200.00	5.00	42,843,750.00	5.00	73,806,640.00	5.00	42,843,750.00	100.00%	58.05%	5.00	40,454,280.00	15.00	126,141,780.00	100.00%	815.3%
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial (Persen)	15.00	100,794,820.00	5.00	28,064,500.00	5.00	46,244,300.00	5.00	28,064,500.00	100.00%	60.69%	5.00	27,275,260.00	15.00	83,404,260.00	100.00%	82.75%
2	07	05	2.0103	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang	36.00	100,794,820.00	12.00	28,064,500.00	12.00	46,244,300.00	12.00	28,064,500.00	100.00%	60.69%	12.00	27,275,260.00	36.00	83,404,260.00	100.00%	82.75%
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase Perselisihan yang Termediasi (Persen)	300.00	53,920,380.00	100.00	14,779,250.00	100.00	27,562,340.00	100.00	14,779,250.00	100.00%	53.62%	100.00	13,179,020.00	300.00	42,737,520.00	100.00%	79.26%
2	07	05	2.0202	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	6.00	23,803,060.00	2.00	4,306,600.00	2.00	10,038,620.00	2.00	4,306,600.00	100.00%	42.90%	2.00	6,882,220.00	6.00	15,495,420.00	100.00%	65.10%
2	07	05	2.0203	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Serikat Pekerja)	3.00	30,117,320.00	1.00	10,472,650.00	1.00	17,523,720.00	1.00	10,472,650.00	100.00%	59.76%	1.00	6,296,800.00	3.00	27,242,100.00	100.00%	90.45%

3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		46,362,060.00		25,266,041.00		314,169,900.00		25,266,041.00				3,438,400.00		53,970,482.00		116.41%	
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG		46,362,060.00		25,266,041.00		314,169,900.00		25,266,041.00				3,438,400.00		53,970,482.00		116.41%	
3	32	03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi (Persen)	60.00	46,362,060.00	20.00	25,266,041.00	20.00	314,169,900.00	20.00	25,266,041.00	100.00%	80.42%	20.00	3,438,400.00	60.00	53,970,482.00	100.00%	116.41%
3	32	03	2.0 1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi (Kali)	60.00	46,362,060.00	20.00	25,266,041.00	20.00	314,169,900.00	20.00	25,266,041.00	100.00%	80.42%	20.00	3,438,400.00	60.00	53,970,482.00	100.00%	116.41%
3	32	03	2.0 1 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu)	36.00	46,362,060.00	12.00	20,273,000.00	12.00	39,485,260.00	12.00	20,273,000.00	100.00%	51.34%	12.00	3,438,400.00	36.00	43,984,400.00	100.00%	94.87%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui Dinas Ketenagakerjaan ingin mewujudkan:

Wirusaha mandiri serta Tenaga kerja yang berdaya saing dan produktif baik berbasis kompetensi kerja maupun keterampilan berbasis masyarakat serta memperoleh perlindungan secara maksimal bagi kesejahteraannya secara lahir dan bathin, sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan serapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan khususnya di Kabupaten Klungkung.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas maka ditetapkan tujuan jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung yaitu Menurunnya Pengangguran dengan indicator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan dua sasaaran yang terdiri dari :

- A. Terserapnya Angkatan Kerja dengan indicator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang di jabarkan dengan lima Program seperti :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotak,
 2. Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja,
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja,
 4. program Pembangunan Kawasan Transmigrasi,
 5. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

- B. Meningkatnya Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja dengan Indikator Jumlah Perselisihan Hubungan industri Dijabarkan dengan Program :
 1. Program Hubungan Industrial, dan yang ke

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	-	IKU	79,00	79,01	79,02	77,23	-	79,02	
2	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	-	IKU	2	2	2	0	1	2	

Sumber: RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Kondisi awal	Target Renstra PD						Capaian akhir
						Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	2	3	4	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Menurunnya Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			1,23	1,21	1,17	1,13	1,09	1,05	1,01	1,01
2		Terserapnya Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-	IKU	77,23%	77,25%	77,27%	77,29%	77,31%	77,33%	77,35%	77,35%
3		Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja	Jumlah perselisihan hubungan industrial	-	IKU	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara

Sumber: RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi social. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan Pendidikan dan pekerjaan berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi social berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, meningkatkan kesejahteraan

tenaga kerja dan keluarganya. Dengan memberdayakan tenaga kerja, membuka peluang serapan tenaga kerja sehingga dapat mencapai tujuan dalam upaya menurunkan pengangguran yang berarti pula mengurangi kemiskinan. Melalui program/ kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung berupaya memberdayakan tenaga kerja di daerah baik yang menganggur, setengah menganggur maupun yang bekerja. Seperti memberikan pelatihan/ pembekalan bagi pencari kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta sertifikasi kompetensi bagi yang sudah terlatih agar lebih mampu bersaing di era globalisasi, padat karya dan pembentukan wirausaha muda yang mandiri, pengembangan TKI pendamping melalui *'transfer knowledge'* dan pengendalian TKA. Memfasilitasi pemberi kerja dengan pencari kerja melalui bursa tenaga kerja, memfasilitasi hubungan industrial guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat dengan meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas, mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Perbandingan penduduk yang tergolong angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dikenal dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan baik di daerah pedesaan dan perkotaan. Apabila angka TPAK kecil maka dapat diperkirakan bahwa penduduk usia kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya cukup banyak. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/ daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, besarnya kesempatan kerja tentunya dapat menurunkan pengangguran.

Tabel 2.4
Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung

URAIAN	TAHUN			
	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	104.268	115.235	131.562	127.801
Bekerja (Jiwa)	98.692	112.973	129864	126227
Pengangguran (Jiwa)	5.577	2.262	1.698	1.574

Bukan Angkatan Kerja (Jiwa)	38.904	29.154	33.135	37.689
Jumlah Penduduk Usia Kerja (Jiwa)	143.172	144.389	164.697	165.490
TKK (%)	94.65	98.04	98.71	98.77
TPAK (%)	72.83	79.81	79.88	77.23
TPT (%)	5.35	1.96	1.29	1.23

Sumber: BPS Kabupaten Klungkung, 2024

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3.1 Bidang Ketenagakerjaan

- 1) Sistem informasi Tenaga Kerja belum terbangun sebagai landasan kebijakan Tenaga Kerja;
- 2) Informasi pasar tenaga kerja baik di daerah maupun luar daerah masih kurang update;
- 3) Masih terbatasnya fasilitasi bursa kerja;
- 4) Masih lemahnya link and match antara lembaga pendidikan dengan kualifikasi kebutuhan dunia kerja;
- 5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi Tenaga Kerja;
- 6) Rendahnya minat kewirausahaan guna penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja mandiri;
- 7) Rendahnya kesadaran dan pemahaman tenaga kerja tentang pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan;
- 8) Masih terbatasnya jaringan kerja dengan Lembaga Diklat dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja;
- 9) Rendahnya minat kewirausahaan di kalangan generasi muda;
- 10) Rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif perusahaan menerapkan norma K3;
- 11) Rendahnya kesadaran perusahaan mematuhi perundang-undangan mengenai Tenaga Kerja;
- 12) Lemahnya kapasitas pengawasan penjaminan sosial tenaga kerja;
- 13) Sistem imbalan yang relatif kompleks dengan banyak variabel tunjangan yang masing-masing mempunyai potensi menjadi sumber perselisihan;
- 14) Banyaknya pekerja berdasarkan kontrak kerja atau tenaga kerja *outsourcing* yang tidak memberikan kepastian untuk dapat terus bekerja;
- 15) Tidak seimbang pertumbuhannya pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia;
- 16) Masih lemahnya pemetaan kebutuhan calon tenaga kerja/tenaga kerja terhadap diklat dan pemagangan

2.3.2 Bidang Transmigrasi

- 1) Lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Program Transmigrasi, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten;
- 2) Lemahnya sosialisasi terkait ketransmigrasian, baik transmigrasi daerah pengiriman maupun daerah penerima;
- 3) Belum adanya perencanaan yang matang dari pemerintah daerah penerima terhadap kehadiran transmigran;
- 4) Animo masyarakat bertransmigrasi bersifat musiman.

Isu strategis urusan ketenagakerjaan meliputi:

- Pengangguran Terbuka Cukup Tinggi
- Kompetensi Tenaga Kerja rendah
- Kesempatan Kerja Kurang

Isu strategis urusan transmigrasi meliputi:

Kesempatan kerja yang kurang menimbulkan Peningkatan minat bertransmigrasi melalui pengembangan potensi ekonomi daerah tujuan transmigrasi. Adanya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang disebabkan oleh keterbatasan lahan perkebunan.

2.3.3 Bidang Urusan ESDM

- 1) Pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta konservasi air tanah belum optimal
- 2) Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Belum Optimal

Kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan (seperti pasir, batu kali, tanah urug, dan kapur) sering dilakukan tanpa memperhatikan kaidah lingkungan dan tata ruang. Selain itu, konservasi air tanah yang belum maksimal menyebabkan penurunan kualitas serta ketersediaan air. Energi Baru Terbarukan seperti tenaga surya, air, angin, biomassa, dan panas bumi masih belum dikembangkan secara maksimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan regulasi, investasi, teknologi, maupun infrastruktur pendukung.

2.4 Reviu terhadap Ranwal RKPD

Reviu terhadap rancangan awal RKPD merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisa kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan Renja dengan kebutuhan riil kegiatan serta pagu PPAS yang ditetapkan. Reviu terhadap rumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026 sudah sesuai dengan Ranwal RKPD, walaupun adanya perubahan indikator kinerja dan pagu anggaran di beberapa program/ kegiatan, berdasarkan analisa kebutuhan. Reviu terhadap rancangan awal RKPD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026 disajikan dalam tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DINAS KETENAGAKERJAAN					6,085,974,112.00						10,776,241,339.00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					6,082,535,712.00						10,766,946,539.00
2	URUSAN KETENAGAKERJAAN					6,082,535,712.00						10,766,946,539.00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75.00	5,501,512,532.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	75.00	5,877,855,339.00		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti (Persen)	100.00	2,209,340.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69.74	2,436,000.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9.00	1,044,640.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8.00	1,271,300.00		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32.00	1,164,700.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32.00	1,164,700.00		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhinya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Persen)	100.00	5,241,689,920.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu (Persen)	100.00	5,604,100,847.00		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	24.00	5,222,614,420.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	31.00	5,585,026,147.00		

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14.00	19,075,500.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14.00	19,074,700.00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tingkat Disiplin Aparatur (Persen)	100.00	11,386,180.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	IP ASN (Persen)	80.73	11,385,800.00	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12.00	11,386,180.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12.00	11,385,800.00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kantor (Persen)	100.00	5,602,100.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah (Poin)	67.19	20,876,000.00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1,042,800.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	1,037,100.00	

2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.00	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.00	15,283,000.00	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.00	2,998,500.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.00	2,998,200.00	
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.00	1,560,800.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4.00	1,557,700.00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100.00	161,750,272.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	100.00	160,335,172.00	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	56,190,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12.00	54,776,000.00	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	105,560,272.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12.00	105,559,172.00	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	100.00	78,874,720.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	100.00	78,721,520.00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18.00	69,624,720.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18.00	69,471,520.00	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15.00	9,250,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	13.00	9,250,000.00	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0.00	-	
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (Orang)	85.00	509,578,260.00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi	110.00	716,221,600.00	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (Orang)	40.00	54,849,940.00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi	2.00	189,493,500.00	
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	40.00	54,849,940.00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun	40.00	189493500.00	

2	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Fasilitas sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (Orang)	45.00	454,728,320.00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja	70.00	526,728,100.00	
1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	45.00	454,728,320.00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	45.00	526,728,100.00	
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Pelayanan Antar Kerja (persen)	20.00	30,990,640.00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri	48.60	132,470,300.00	
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja (Kerjasama)	20.00	30,990,640.00	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja	120.00	132,470,300.00	
1	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	500.00	30,990,640.00	Pelayanan antar Kerja	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	62111.00	132,470,300.00	
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Hak Hak Pekerja (Persen)	5.00	40,454,280.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	4857.00	4,040,399,300.00	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perusahaan yang Menerapkan sarana Hubungan industrial (Persen)	5.00	27,275,260.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	5.00	4,027,214,100.00	

1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	12.00	27,275,260.00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12.00	4,027,214,100.00	
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perselisihan yang Termediasi (Persen)	100.00	13,179,020.00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Perselisihan Termediasi	100.00	13,185,200.00	
1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	2.00	6,882,220.00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2.00	6,863,800.00	
2	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Serikat Pekerja)	1.00	6,296,800.00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	1.00	6,321,400.00	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,438,400.00				9,294,800.00	
4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGTRANSMIGRASI						3,438,400.00				3,438,400.00	
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi (Persen)	20.00	3,438,400.00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi	5.00	3,438,400.00	

1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi (Kali)	20.00	3,438,400.00	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi	12.00	3,438,400.00	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.00	3,438,400.00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.00	3,438,400.00	
4	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									5,856,400.00	
2						PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT	5.00	5,856,400.00	
1						Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT	5.00	5,856,400.00	
1						Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12.00	5,856,400.00	

2.5 Penelahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2025, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menggali usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renja telah disampaikan dan dibahas pada forum Perangkat Daerah hari dan tanggal 4 Maret 2025 yang dilaksanakan melalui zoom meeting yang diikuti oleh lintas sektoral (BPS Kabupaten Klungkung), Perangkat Daerah dan seluruh pejabat dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung akan tetapi tidak ada usulan kegiatan yang menyangkut ke Dinas Ketenagakerjaan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahan Kebijakan Nasional

Telahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan pembangunan nasional yang terkait dengan arah kebijakan Nasional Kemnaker pada 2024-2026. Rinciannya adalah sebagai berikut ini:

- 1) Mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills.
- 3) Mengembangkan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.
- 4) Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi "demand" tenaga kerja.
- 5) Memperkuat relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).
- 6) Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
- 7) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.
- 8) Meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik Peningkatan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) secara online.
- 9) Menempatkan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai program prioritas nasional/daerah;
- 10) Mendorong peningkatan kemandirian ekonomi di kawasan transmigrasi sesuai prinsip ekonomi hijau;
- 11) Mengembangkan mekanisme (model) introduksi kegiatan ekonomi baru di kawasan transmigrasi;
- 12) Meningkatkan kontribusi perekonomian kawasan transmigrasi terhadap kabupaten/provinsi.

- 13) Mempertegas pembagian peran pemerintah/pemda dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan transmigrasi;
- 14) Meningkatkan konektivitas internal kawasan transmigrasi;
- 15) Meningkatkan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan pusat-pusat pelayanan di sekitarnya;
- 16) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur serta aksesibilitas di kawasan transmigrasi.
- 17) Memantapkan basis data calon transmigran minimal hingga tingkat kabupaten;
- 18) Memantapkan kriteria, target, dan proses seleksi calon transmigran;
- 19) Meningkatkan penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan transmigrasi;
- 20) Mendorong proses integrasi sosial budaya baik antar sesama transmigran maupun antara transmigran dengan penduduk setempat.
- 21) Meningkatkan sinergi pusat dengan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan transmigrasi;
- 22) Membangun kerjasama antara daerah (terutama antar provinsi) yang efisien dan efektif dalam mengembangkan kawasan transmigrasi;
- 23) Mengembangkan program insentif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program pembinaan berkelanjutan untuk membangun kawasan transmigrasi;
- 24) Meningkatkan efektifitas delivery program untuk pembangunan kawasan transmigrasi dengan merujuk pada skema desentralisasi.
- 25) Mengembangkan model promosi yang efektif dan efisien untuk kawasan transmigrasi prioritas dan kawasan transmigrasi baru;
- 26) Memantapkan mekanisme penyediaan lahan untuk kawasan transmigrasi terutama pada wilayah dengan sistem tenurial yang khas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029 kita juga mengacu keprioritas daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melalui program pelatihan berbasis kompetensi, diharapkan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

2. Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja ditunjukkan melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan dalam program jaminan sosial, serta penegakan norma kerja yang berkeadilan.

Maka penyusunan RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun 2025 -2029 mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Selanjutnya berpedoman pada hasil evaluasi hasil renja PD tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran Renstra PD.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan tiga bidang urusan pemerintahan yaitu bidang urusan wajib bukan pelayanan dasar ketenagakerjaan, bidang urusan pilihan Ketenagakerjaan, transmigrasi dan ESDM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan harus sejalan dengan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berbudaya Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Kerthi, dan telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Klungkung 2025-2029. Dinas Ketenagakerjaan memiliki tugas dan fungsi yang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut serta sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan menetapkan satu tujuan dengan dua sasaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran
----	--------	---------	---------------------------	------------------------

1.	Menurunnya Pengangguran.		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1,17 %
		Terserapnya angkatan kerja.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	77,27 %
		Meningkatnya Perlindungan Hak – Hak Tenaga Kerja.	Jumlah perselisihan Hubungan Industrial	2 Perkara

3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1 Faktor- Faktor yang Menjadi Pertimbangan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Meningkatnya produktivitas dan daya saing dipengaruhi oleh ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah di bidangnya. Terkait dengan hal tersebut TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah/daerah. Karena semakin tinggi TPAK maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana semakin banyak pasokan tenaga kerja (labour supply) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di daerah tersebut. TPAK yang tinggi juga menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, berikut ini gambaran TPAK seluruh Bali :

Tabel 3.2

Tingkat partisipasi Angkatan kerja Provinsi Bali

Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi Angkatan kerja Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota		
	2022	2023	2024
Kabupaten Jembrana	80,60	80,05	80,10
Kabupaten Tabanan	76,93	74,16	75,29
Kab. Badung	72,80	73,79	75,59
Kab. Gianyar	80,26	77,26	76,50
Kab. Klungkung	79,81	79,88	77,23
Kab. Karangasem	83,36	83,04	82,27
Kab. Buleleng	85,39	86,01	83,74
Kota Denpasar	75,38	75,49	79,77
Provinsi Bali	72,37	73,13	69,71
	76,86	77,08	77,11

Sumber : BPS Kabupaten Klungkung

3.3.2 Penjelasan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak Sesuai dengan Rencana Awal

Dari keseluruhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan, yaitu 6 (enam) Program dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan yang mencakup tiga bidang urusan yaitu bidang urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasian dan ESDM. Secara keseluruhan tidak ada yang tidak sesuai dari rencana awal pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN DEKORASI-DASAR			6.076.962.188,00				10.766.946.539,00			
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			6.076.962.188,00				10.766.946.539,00			
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	72,00	5.535.935.008,00	APBD	75,00	5.877.855.339,00		
2	07	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	2.209.340,00	APBD	69,74	2.436.000,00	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9,00	1.044.640,00	APBD	8,00	1.271.300,00
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32,00	1.164.700,00	APBD	32,00	1.164.700,00

2	07	01	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu (Persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	5.264.466.064,00	DAU		100,00	5.604.100.847,00	
2	07	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24,00	5.226.783.072,00	DAU		31,00	5.585.026.147,00
2	07	01	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tr iwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14,00	37.682.992,00	APBD		14,00	19.074.700,00
2	07	01	2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN (Persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	60.016.972,00	APBD		80,73	11.385.800,00	
2	07	01	2.0 5	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administra si Kepegawai an (Dokumen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	60.016.972,00	APBD		12,00	11.385.800,00
2	07	01	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kebersihan Internal Perangkat Daerah (Poin)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	5.573.600,00	APBD		67,19	20.876.000,00	
2	07	01	2.0 6	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00	1.042.800,00	APBD		1,00	1.037.100,00
2	07	01	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	0,00	APBD		1,00	15.283.000,00
2	07	01	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3,00	2.970.000,00	APBD		3,00	2.998.200,00
2	07	01	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,00	1.560.800,00	APBD		4,00	1.557.700,00

2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	157.909.272,00	APBD		100,00	160.335.172,00	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	52.349.000,00	APBD		12,00	54.776.000,00
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	105.560.272,00	APBD		12,00	105.559.172,00
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik (Persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	51.333.360,00	APBD		100,00	78.721.520,00
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18,00	42.083.360,00	APBD		18,00	69.471.520,00
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,00	9.250.000,00	APBD		13,00	9.250.000,00
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-	0,00	APBD		0,00	-
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi (orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85,00	469.582.260,00	APBD		110,00	716.221.600,00
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi (pelatihan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00	54.849.940,00	APBD		2,00	189.493.500,00
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun (orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,00	54.849.940,00	APBD		40,00	189.493.500,00
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja (orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,00	414.732.320,00	APBD		70,00	526.728.100,00
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	45,00	414.732.320,00	APBD		45,00	526728100,00

2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri (persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	30.990.640,00	APBD		48,60	132.470.300,00	
2	07	04	2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyediaa pasar kerja (kerjasama)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	30.990.640,00	APBD		120,00	132.470.300,00	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	500,00	30.990.640,00	APBD		62111,00	132.470.300,00
2	07	05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial (orang)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,00	40.454.280,00	APBD		4857,00	4.040.399.300,00	
2	07	05	2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB) (perusahaan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,00	27.275.260,00	APBD		5,00	4.027.214.100,00	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (laporan)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	27.275.260,00	APBD		12,00	4.027.214.100,00
2	07	05	2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi (persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,00	13.179.020,00	APBD		100,00	13.185.200,00	
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (perkara)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,00	6.882.220,00	APBD		2,00	6.863.800,00
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (serikat pekerja)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,00	6.296.800,00			1,00	6.321.400,00

3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.438.400,00				9.294.800,00	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			3.438.400,00				3.438.400,00	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRAS	Persentase Animo transmigrasi yang terfasilitasi (persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	3.438.400,00	APBD		5,00	3.438.400,00
3	32	03	2.0		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi (kali)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,00	3.438.400,00	APBD		12,00	3.438.400,00
3	32	03	2.0	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kejasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,00	3.438.400,00	APBD		12,00	3.438.400,00
3	29				URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							5.856.400,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT (KK)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		APBD		5,00	5.856.400,00
3	29	05	2.0		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT (persen)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		APBD		5,00	5.856.400,00
3	29	05	2.0	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota (laoran)	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	-		APBD		12,00	5.856.400,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan Rensta PD Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung dengan mendukung RPD Kabupaten Klungkung menetapkan tiga sasaran untuk mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Ketenagakerjaan memiliki 6 (enam) program dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan yang mencakup tiga bidang urusan yaitu bidang urusan Ketenagakerjaan, Transmigrasian dan ESDM. Keseluruhan lokasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Klungkung, sedangkan total kebutuhan Pagu indikatif yang perlukan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp. 10.776.241.339,00

Berikut Tabel rancangan akhir rencana kerja organisasi perangkat daerah (renja opd) Dinas Ketenagakerjaan kabupaten klungkung tahun 2026 :

Tabel 4.1

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. KLUNGKUNG TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KETENAGAKERJAAN						10.776.241.339,00							10.458.895.204,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.766.946.539,00							10.300.143.204,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						10.766.946.539,00							10.300.143.204,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>	-			75 Indeks	5.877.855.339,00						-	6.262.390.114,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>	-			69,74 Nilai	2.436.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesainya evaluasi kinerja perangkat daerah	-	29.142.808,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				8 Dokumen	1.271.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencengahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesainya evaluasi kinerja perangkat daerah		10.596.808,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				32 Laporan	1.164.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesainya evaluasi kinerja perangkat daerah		18.546.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu</i>	-			100 Persen	5.604.100.847,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesainya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinya laporan Bulanan / Triulanana	-	5.771.313.050,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				31 Orang/bulan	5.585.026.147,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesainya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinya laporan Bulanan / Triulanana		5.744.373.250,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				14 Laporan	19.074.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselesaikannya kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta Terpenuhinya laporan Bulanan / Triulanana		26.939.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>IP ASN</i>	-			80,73 Persen	11.385.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terseleenggarannya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	-	50.194.180,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	11.385.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terseleenggarannya Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		50.194.180,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah</i>	-			67,19 Persen	20.876.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terseleenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	84.575.300,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.037.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.262.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15.283.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		77.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	2.998.200,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Ke/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.165.800,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				4 Dokumen	1.557.700,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggarannya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.146.700,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 Persen	160.335.172,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggarannya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	-	197.885.672,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	54.776.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggarannya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		68.450.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	105.559.172,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggarannya Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah		129.435.672,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang dipelihara dalam kondisi baik</i>	-			100 Persen	78.721.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	129.279.104,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				18 Unit	69.471.520,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Tata Kelola Pemerintahan	Terselenggarannya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		95.049.104,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				13 Unit	9.250.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		14.230.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				0 Unit	0,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		20.000.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	<i>Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi</i>	-			110 Orang	716.221.600,00						-	1.519.933.150,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi</i>	-			2 Pelatihan	189.493.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Terlaksananya Pelatihan kompetensi	-	472.328.650,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				40 Orang	189.493.500,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Terlaksananya Pelatihan kompetensi		472.328.650,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja</i>	-			70 Orang	526.728.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	terlaksananya uji kompetensi tenaga kerja	-	1.047.604.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				45 Dokumen	526.728.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	terlaksananya uji kompetensi tenaga kerja		1.047.604.500,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang di Tempatkan Dalam Negeri	-			48,60 Persen	132.470.300,00						-	2.317.176.040,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama penyediaan pasar kerja	-			120 Kerjasama	132.470.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Penempatan tenaga kerja melalui layanan AKAD dan AK	-	2.317.176.040,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				62.111 Orang	132.470.300,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Penempatan tenaga kerja melalui layanan AKAD dan AK		2.317.176.040,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	-			4.857 Pekerja	4.040.399.300,00						-	200.643.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan perusahaan (PP) / Perjanjian kerja bersama (PKB)	-			5 Perusahaan	4.027.214.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	-	121.568.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	4.027.214.100,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		121.568.900,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perselisihan Termediasi	-			100 Persen	13.185.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Termediasinya Perselisihan Hubungan Industrial	-	79.075.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				2 Perkara	6.863.800,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Termediasinya Perselisihan Hubungan Industrial		31.301.400,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				1 Asosiasi dan Serikat Pekerja	6.321.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan Kemiskinan	Termediasinya Perselisihan Hubungan Industrial		47.773.600,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						9.294.800,00							158.752.000,00	
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						5.856.400,00							80.585.000,00	
1.	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	<i>Jumlah Rumah tangga penerima Listrik yang bersumber dari pembangkit EBT</i>	-			5 KK	5.856.400,00						-	80.585.000,00	
	3.29.05.2.01	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase rumah tangga penggunaan Listrik EBT</i>	-			5 Persen	5.856.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi Kelestarian Lingkungan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	-	80.585.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.29.05.2.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	5.856.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan, Kehutanan, dan Energi Kelestarian Lingkungan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah		80.585.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						3.438.400,00							78.167.000,00	
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	<i>Persentase Animo Transmigrasi yang Terasiliasi</i>	-			5 Persen	3.438.400,00						-	78.167.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pendataan Animo Transmigrasi</i>	-			12 Kali	3.438.400,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Kemiskinan	Tertindakannya pendataan animo transmigrasi	-	78.167.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	3.438.400,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Kesehatan, Pendidikan, Jaminan Sosial, dan Ketenagak erjaan Kemiskinan	Tertindakannya pendataan animo transmigrasi		78.167.000,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
J U M L A H								10.776.241.339,00							10.458.895.204,00	

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan selama tahun 2026 dilingkup Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung. Renja Dinas Ketenagakerjaan disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti: Visi Kabupaten Klungkung Mahotama dan Misi Kabupaten Klungkung

1. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi,
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri dan
3. Mengembangkan sistem sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi serta evaluasi renja tahun sebelumnya.

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu: Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran serta bisa Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Kaidah Pelaksanaan Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung yang meliputi tiga bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Ketenagakerjaan, serta urusan pilihan Transmigrasi dan ESDM, ditetapkan Tujuan yaitu: Meningkatnya daya saing masyarakat dengan indikator Tingkat pengangguran terbuka , sasaran

1. Terserapnya angkatan kerja dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja dan
2. Meningkatnya perlindungan hak-hak tenaga kerja dengan indikator Jumlah perselisihan hubungan industrial.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung yang akan ditetapkan dengan, melalui 6 (enam) program, 13 (tiga belas) Kegiatan serta 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan. Dengan mengoptimalkan dalam

pelaksanaan Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA